

Polisi-Kejaksaan Diminta Selidiki Bank Jateng

SEMARANG – Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng mendesak kepolisian maupun kejaksaan segera menyelidiki PT Bank Jateng. Hal ini menyusul belum diselesaikannya permasalahan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2014.

Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto mengatakan, pa-

tut diduga ada permasalahan pidana korupsi di tubuh bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu.

“Jika batas waktu perbaikan yang diberikan BPK telah habis dan hasil temuan belum dituntaskan, patut diduga ada permasalahan serius di Bank Jateng itu. Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum segera menyelidiki terkait hal ini,” kata dia, kemarin.

Ke Hal 7

(dari Hal 1

Aparat penegak hukum, kata Eko, tidak perlu menunggu ada laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran hukum di PT Bank Jateng tersebut. Sebab hasil LHP BPK RI sudah cukup menjadi pintu masuk mereka untuk menyelidiki.

“Korupsi itu tidak harus menunggu delik aduan, apalagi ini sudah ada LHP BPK yang jelas menemukan ada berbagai permasalahan. LHP ini dapat dijadikan pintu masuk mengorek permasalahan di bank Jateng,” katanya.

Melihat temuan dari LHP BPK tersebut, Eko menduga jumlah dugaan ada penyelewengan keuangan sangat besar sehingga hal itu sangat fatal dan mendesak diselidiki.

“Temuan BPK itu sudah mengindikasikan ada pelanggaran hukum. Secepatnya penegak hukum harus turun dan memanggil Direktur Bank Jateng, jajaran direksi, serta komisarisnya untuk meminta pertanggungjawaban,” katanya.

Direktur Utama PT Bank Jateng Supriyatno saat dikonfirmasi membenarkan belum selesainya LHP yang diberikan pihak BPK. Saat ini pihaknya terus berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi temuan BPK itu. “LHP itu punya jenjang waktu yang lebih banyak. Saat ini proses penyelesaian terus kami lakukan. Kami terus berupaya merampungkannya,” kata dia.

Supriyanto membuka diri jika memang ada indikasi pidana dalam LHP BPK itu. Namun, dia mengatakan prosesnya tidak semudah itu. “Memang kalau ada indikasi pidana

bisa masuk, tapi tidak semudah itu. Saat ini kami baru mengidentifikasi dan menyelesaikan. Saya kira pihak BPK sudah memahami permasalahan kami,” katanya.

Untuk diketahui, BPK RI Perwakilan Jateng telah mengeluarkan LHP tahun 2014 kepada PT Bank Jateng pada 12 Desember 2014. Dalam LHP itu, BPK menemukan setidaknya enam permasalahan yang terjadi di bank milik pemerintah tersebut.

Temuan itu di antaranya ada Saldo Giro BI per 31 Desember 2013 yang mengalami lebih saji (*overstated*) dan saldo rekening penampungan kliring tidak bisa dijelaskan. Selain itu, penyajian Giro ABA BCA atas kerja sama antara BPD Jateng dengan PT RS atas penggunaan ATM bersama per 31 Desember 2013 juga terjadi *overstated* senilai Rp30 miliar.

BPD Jateng juga diketahui ada kelebihan biaya pencadangan Tantiem, jasa produksi dan penghargaan akhir masa jabatan Direksi tahun 2013 sebesar Rp39,4 miliar yang belum diperhitungkan dalam biaya tahun 2014. Selain itu, terjadi kelebihan pembayaran honorarium Dewan Komisaris yang melebihi ketentuan BI tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Temuan lain, BPD Jateng juga belum memberikan data lengkap atas rekening kas daerah ke pemda. Selain itu, juga ada kredit proyek ke PT Bum dengan plafon sebesar Rp50 miliar yang digunakan tidak sesuai persetujuan kredit sebesar Rp27,9 miliar.

● andika prabowo